



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalian potensi daerah baik yang telah menjadi objek retribusi daerah maupun dengan menggali potensi-potensi daerah yang baru;
  - bahwa Retribusi Terminal sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, sehingga dirasa perlu untuk disesuaikan;
  - bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Meningat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  - Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.